



PENETAPAN RENSTRA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN**

2025 - 2029

Jl. Prof. Dr. Soedewi, Tungkal Harapan, Kec.
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Jambi 36514
@bappeda_tjb
<https://bappeda.tanjabbarkab.go.id>

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025**



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
18. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk menjamin strategi, kebijakan, tujuan, sasaran, dan program, yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar kegunaan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penetapan Renstra; dan
- c. Evaluasi dan Pelaporan hasil Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. Sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

BAB IV PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dan disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA;
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan meliputi tujuan dan sasaran, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra-nya dengan menggunakan Formulir E.80. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah setiap bulan Januari melaporkan hasil evaluasi kepada bupati melalui Kepala BAPPEDA kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai target dan pendanaan tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2030.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yang ditetapkan sebagai berikut:

1. RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2. RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
3. RENSTRA INSPEKTORAT
4. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5. RENSTRA DINAS KESEHATAN
6. RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7. RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
8. RENSTRA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
9. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
10. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12. RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
13. RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14. RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN
15. RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16. RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
18. RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19. RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. RENSTRA DINAS SOSIAL
21. RENSTRA DINAS TENAGA KERJA
22. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
23. RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24. RENSTRA DINAS PERIKANAN
25. RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
26. RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27. RENSTRA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28. RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29. RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
30. RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
31. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
32. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ILIR
33. RENSTRA KECAMATAN BETARA
34. RENSTRA KECAMATAN PENGABUAN

35. RENSTRA KECAMATAN MERLUNG
36. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL ULU
37. RENSTRA KECAMATAN SEBERANG KOTA
38. RENSTRA KECAMATAN BRAM ITAM
39. RENSTRA KECAMATAN KUALA BETARA
40. RENSTRA KECAMATAN SENYERANG
41. RENSTRA KECAMATAN MUARA PAPALIK
42. RENSTRA KECAMATAN RENAH MENDALUH
43. RENSTRA KECAMATAN TEBING TINGGI
44. RENSTRA KECAMATAN BATANG ASAM
45. RS UMUM DAERAH K.H. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL
46. RS UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN MERLUNG

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 disusun dengan memedomani RPJMD yang sudah ditetapkan dan telah di verifikasi kesesuaiannya oleh tim verifikator Renstra Kabupaten dan di sampaikan ke kepala daerah untuk di tetapkan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 ini di gunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan, alat kendali dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Kuala Tungkal, September 2025

Plt. KEPALA BAPPEDA
KAB. TANJUNG JABUNGBARAT



Peri Noprianto, SE.
Pembina TK. I
Nip. 19731116 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum3

1.3. Maksud dan Tujuan5

1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan 8

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi8

2.1.2. Sumber Daya17

2.1.3. Kinerja Pelayanan20

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....24

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis..... 25

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah 25

2.2.2. Isu Strategis..... 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025-202930

3.2. Arah Kebijakan Bappeda dalam Mencapai
Tujuan dan Sasaran34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Uraian Program 37

4.2. Uraian Kegiatan..... 42

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka
mendukung program prioritas
pembangunan daerah 82

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan
dan sasaran Renstra Bappeda Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 84

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator
Kunci (IKK) 86

BAB V PENUTUP 91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hal 00

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di laksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencanakerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UUNo. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJM.

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan

RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra – Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4);

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 23 dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 1 angka 7, maka nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Dokumen Perencanaan berubah menjadi Perangkat Daerah, dan dipertegas dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 dan bersifat indikatif.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025 – 2029 disusun untuk dijadikan landasan dalam penyusunan rencana kerja tahunan sampai perencanaan tahun 2026, dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional maupun nasional.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2029 adalah :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-

2033;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25);

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Menyesuaikan arah dan pedoman dalam menentukan prioritas- prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sesuai dengan 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD sampai Tahun 2026;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 dengan menyesuaikan dan merasionalkan indikator dan target kinerja;
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.2. Sumber Daya

2.1.3. Kinerja Pelayanan

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan Bappeda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Hal 00

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Gambaran Pelayanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 1 subbagian dan Pejabat fungsional serta empat kepala bidang yang dibantu oleh pejabat fungsional dan staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 65 orang.

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 tahun 2023, tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana;

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana;

- a. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan data, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan pemerintahan, serta sarana dan prasarana; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat

- menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset; .
 - f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. Penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- g. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Hal 00

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

D. Bidang Sosial Dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah. Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Sarana Dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

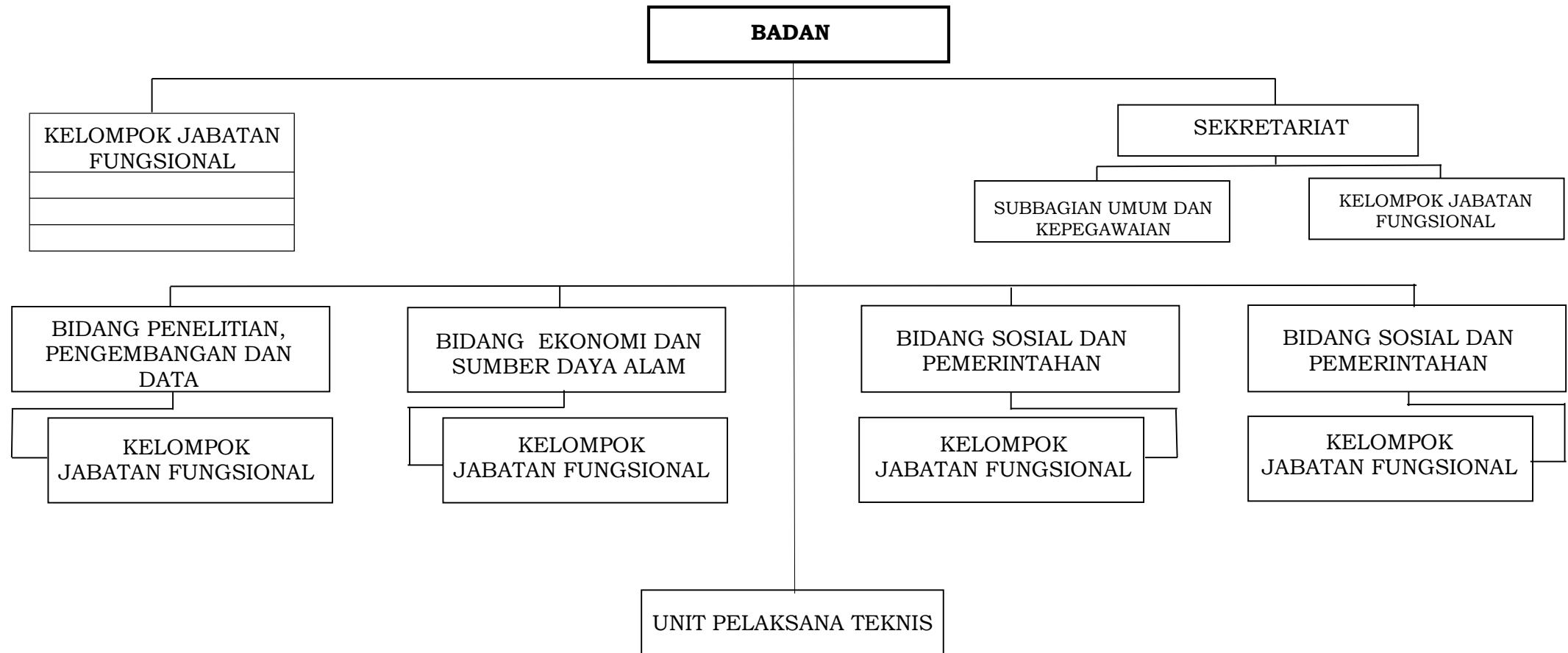
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. Pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.1.2. Sumber Daya

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 65 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut : Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Hal 00
1. Golongan IV, sebanyak 6 Orang terdiri dari :
 1. Golongan IV/c : 0 Orang
 2. Golongan IV/b : 2 Orang
 3. Golongan IV/a : 4 Orang
 2. Golongan III, sebanyak 15 Orang terdiri dari :
 1. Golongan III/d : 4 Orang
 2. Golongan III/c : 3 Orang
 3. Golongan III/b : 4 Orang
 4. Golongan III/a : 5 Orang
 3. Golongan II, sebanyak 2 Orang terdiri dari :
 1. Golongan II/d : 1 Orang
 2. Golongan II/c : 1 Orang
 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja, sebanyak 6 Orang, terdiri dari :
 1. Golongan IX : 3 Orang
 2. Golongan VII : 1 Orang
 3. Golongan V : 2 Orang

Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

5. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 4 Orang terdiri dari :
 1. Magister Teknik : 1 Orang
 2. Magister Manajemen – MM : 1 Orang
 3. Magister URP – M.URP : 1 Orang
 4. Magister Sains – M.S.I : 1 orang
6. Sarjana (S1), sebanyak 45 Orang terdiri dari :
 1. Sarjana Sains Terapan Pemerintahan : 1 Orang
 2. Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan : 1 Orang

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 3. Sarjana Ekonomi | : 18 Orang |
| 4. Sarjana Hukum | : 4 Orang |
| 5. Sarjana Teknik | : 2 Orang |
| 6. Sarjana Administrasi Publik | : 9 Orang |
| 7. Sarjana Komputer | : 2 Orang |
| 8. Sarjana Ilmu Komunikasi | : 4 orang |
| 9. Sarjana sains | : 1 Orang |
| 10. Sarjana Sosial Pemerintahan | : 1 Orang |
7. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 1 Orang
8. Sekolah Tingkat Menengah Atas /Sederajat sebanyak 23 Orang

Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

9. Eselon II, sebanyak 1 Orang
10. Eselon III, sebanyak 3 Orang
11. Eselon IV, sebanyak 1 Orang
12. Kelompok Jabatan Fungsional, sebanyak 8 orang, terdiri :
 1. Fungsional Ahli Muda : 6 Orang
 2. Fungsional Ahli Pertama : 2 Orang
13. Non Eselon, sebanyak 17 Orang

Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

14. PNS, sebanyak 24 Orang
15. PPPK, sebanyak 6 Orang
16. TKK, sebanyak 35 Orang

**Tabel 2.1. : Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat**

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
1.	KOMPUTER	
	✓ Mini Komputer	4 unit
	✓ Internet	1 Unit
	✓ P.C Unit	48 Unit
	✓ Laptop	45 Unit
	✓ Note Book	12 Unit
	✓ Tablet PC	2 Unit
	✓ Personal Komputer lainnya	14 Unit
	✓ Hard Disk	11 Unit
	✓ Scanner (Peralatan Mini Komputer)	3 Unit
	✓ Printer (Peralatan Personal Komputer)	64 Unit
	✓ Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8 Unit
	✓ External	6 Unit
	✓ Server	4 Unit
	✓ Router	7 Unit
2.	ALAT ANGKUTAN	
	✓ Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	7 Unit
	✓ Pick Up	1 Unit
	✓ Sepeda Motor	33 Unit
3.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	✓ Global Positioning System	4 Unit
4.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
	✓ Mesin Hitung Manual	1 Unit
	✓ Mesin Absen (Time Recorder)	1 Unit
	✓ Lemari Kayu	3 Unit
	✓ Filing cabinet Besi	16 Unit
	✓ Brandkas	1 Unit
	✓ Lemari Makan	3 Unit
	✓ CCTV - camera Control Television System	3 Unit
	✓ White Board	2 Unit
	✓ Peta	1 Unit
	✓ Alat Penghancur Kertas	2 Unit
	✓ Alat Kantor Lainnya	2 Unit
	✓ Meja Kerja Kayu	2 Unit
	✓ Meja Rapat	37 Unit
	✓ Meja Podium	1 Unit
	✓ Meja Resepsionis	1 Unit
	✓ Meja Panjang	10 Unit
	✓ Meja Makan	3 Unit

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
	✓ Kursi Tamu	2 Unit
	✓ Kursi Putar	52 Unit
	✓ Sofa	28 Unit
	✓ Mesin Penghisap Debu Vacuum Cleaner	4 Unit
	✓ Lemari Es	8 Unit
	✓ A.C. Split	4 Unit
	✓ Televisi	10 Unit
	✓ Sound System	2 Unit
	✓ Wireless	1 Unit
	✓ Unit Power Suplay	9 Unit
	✓ Stabilisator	1 Unit
	✓ Camera Video	1 Unit
	✓ Tangga Aluminium	3 Unit
	✓ Dispenser	11 Unit
	✓ Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Unit
	✓ Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
	✓ Meja Kerja Pegawai Non Struktural	65 Unit
	✓ Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	158 Unit
	✓ Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	27 Unit
5.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	✓ Microphone/Wireless MIC	1 Unit
	✓ Digital LED Running Text	1 Unit
	✓ Tripod Camera	3 Unit
	✓ Layar Film/Projector	7 Unit
	✓ Camera Digital	5 Unit
	✓ Handy Talky (HT)	2 Unit
	✓ Facsimile	1 Unit
	✓ Antene UHF Portable	1 Unit
	✓ Genset	1 Unit

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan peraturan perundang-undangan dan di dilaksanakan tepat waktu;

2. Penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan tepat waktu;
3. Pelaksanaan evaluasi/review dokumen perencanaan sesuai yang diamanahkan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pendampingan penyusunan dokumen perencanaan terhadap mitra Perangkat Daerah;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan perkantoran, tertib administrasi perencanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah;
4. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
5. Tersedianya data / informasi daerah yang valid dan terbaru yang dilakukan melalui sistem pendataan, evaluasi dan analisis dan di wujudkan dalam bentuk buku maupun dokumen;
6. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
8. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Capaian Kinerja Sesuai Perencanaan				92%	92%	94%	95%	96%	92%	92%	94%	94%	94%	100%	100%	100%	99%	100%
2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan				92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah				14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Uraian / Program	Anggaran Pada Tahun 2021 – 2024				Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021 - 2024				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021 - 2024				Rata - Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	3.268.041.477	8.405.532.420	7.011.052.018	9.447.940.130	2.353.140.369	-	6.677.315.098	8.627.499.968	72	87	95	91	31	33
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBAGUNAN DAERAH	882.253.000	835.260.000	401.466.000	364.944.800	809.607.000	804.235.000	344.518.120	334.823.287	92	96	86	92	33	37
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBAGUNAN DAERAH	-	-	270.525.000	120.800.000	-	-	234.194.600	119.900.000	-	-	87	99	62	62
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	588.955.000	636.665.000	945.499.100	552.909.000	553.705.250	610.358.000	771.078.653	511.880.430	94	96	82	93	8	6
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	322.408.000	133.437.800	105.555.200	-	307.045.000	123.682.800	105.455.200	-	95	93	100	13	14

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Bappeda sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam bidang perencanaan pembangunan berperan untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kelompok sasaran layanan Bappeda meliputi berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Kelompok sasaran utama layanan Bappeda antara lain :

1. Pemerintah Daerah

Kepala Daerah dan perangkat daerah yang membutuhkan dukungan data, analisis, serta rekomendasi kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan maupun tahunan.

2. Perangkat Daerah/OPD

Seluruh organisasi perangkat daerah sebagai pengguna layanan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, monitoring dan evaluasi pembangunan agar selaras dengan visi dan misi daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai mitra strategis dalam pembahasan, sinkronisasi dan pengesahan kebijakan pembangunan daerah.

4. Masyarakat

Individu maupun kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akhir pembangunan, sekaligus sebagai pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan partisipatif (Musrenbang, forum konsultasi publik dan survei kepuasan).

5. Dunia Usaha dan Akademisi

Pelaku usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam menyediakan data, masukan dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis bukti dan kolaborasi

6. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Sebagai pihak yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi

Dengan kelompok sasaran layanan yang luas dan beragam, Bappeda berperan sebagai motor koordinasi pembangunan daerah. Layanan yang diberikan tidak hanya berupa dokumen perencanaan, tetapi juga proses fasilitasi, pengendalian dan evaluasi yang memastikan setiap program pembangunan tepat sasaran, efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda sering dihadapkan pada berbagai permasalahan dan isu strategis.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan tersebut muncul baik dari aspek kelembagaan, tata kelola perencanaan, kualitas data dan informasi, maupun dukungan sumber daya. Antara lain permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keselarasan antara perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten belum optimal.
2. Perencanaan perangkat daerah masih menghadapi kendala dalam pemenuhan dokumen perencanaan yang berkualitas dan pemenuhan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada proses perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data.
3. Koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan program masih ditemukan tumpang tindih maupun kurangnya keterpaduan antar sektor pembangunan.
4. Kapasitas sumber daya manusia perencana dan peneliti masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis, pemanfaatan

teknologi digital, maupun kemampuan analisis untuk merespon dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

5. Masih minimnya penelitian, pengembangan, riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Namun dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Bappeda masih menghadapi sejumlah isu strategis yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas kinerjanya.

Beberapa isu strategis utama antara lain :

1. Kualitas data dan informasi

Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan sering kali belum terintegrasi secara optimal antara perangkat daerah. Hal ini menyebabkan perencanaan menjadi kurang akurat dan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

2. Koordinasi dan sinkronisasi

Proses perencanan pembangunan memerlukan koordinasi lintas sektor. Namun, masih terdaoat hambatan komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang menyebabkan keterlambatan, duplikasi program, atau kurangnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan pusat.

3. Pemanfaatan teknologi informasi

Sistem informasi perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada pelayanan yang dilakukan secara manual sehingga menimbulkan keterlambatan dan menurunkan kualitas pelayanan publik

4. Kapasitas SDM

Sebagai aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi, baik dalam hal perencanaan berbasis data, penyusunan dokumen perencanaan, maupun penguasaan aplikasi digital. Keterbatasan kapasitas SDM ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kebutuhan sasaran layanan Bappeda

5. Transparansi dan aksesibillitas layanan

Informasi terkait dokumen perencanaan, evaluasi, serta hasil

pembangunan daerah belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat dan stakeholder lain, sehingga akuntabilitas pelayanan Bappeda masih perlu ditingkatkan.

6. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan alokasi anggaran sering menjadi kendala dalam pengembangan sistem pelayanan yang lebih modern dan responsif, termasuk dalam penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal 00

2.2.2. Isu Strategis

Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, penting untuk memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang pada tataran global, nasional, maupun regional. Hal ini dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah mampu beradaptasi dengan perubahan, sekaligus menangkap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat global, isu yang berpengaruh antara lain perubahan iklim dan bencana alam, ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi digital, serta tuntutan pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dinamika tersebut menuntut daerah untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan sumber daya, mendorong pemanfaatan energi terbarukan, serta mengembangkan tata kelola berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.

Pada tingkat nasional, isu strategis yang berkembang mencakup penguatan daya saing ekonomi, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menuntut daerah untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan yang selaras dengan agenda prioritas nasional, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Pada tingkat regional/daerah, isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi disparitas pembangunan antarwilayah,

keterbatasan infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik yang belum merata, serta masih terbatasnya integrasi perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, Bappeda juga perlu mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta optimalisasi pengelolaan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan mengidentifikasi isu-isu strategis tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan dinamika lingkungan eksternal, sekaligus berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penyimpulan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			
			Global	Nasional	Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
- Lahan pertanian dan perkebunan yang luas (sawit, kelapa, padi) - Koordinasi perencanaan tingkat kabupaten - Koordinasi perencanaan lintas OPD - Koordinasi perencanaan tingkat pusat, provinsi dan daerah - Sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan daerah - Koordinasi perencanaan dengan kabupaten tetangga	- Keselarasan antara perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten belum optimal. - Perencanaan perangkat daerah masih menghadapi kendala dalam pemenuhan dokumen perencanaan yang berkualitas dan pemenuhan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi. Kondisi ini berdampak pada proses perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data. - Koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan program masih ditemukan tumpang tindih maupun kurangnya keterpaduan antar sektor pembangunan. - Kapasitas sumber daya manusia perencana dan peneliti masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi digital, maupun kemampuan analisis untuk merespon dinamika pembangunan yang semakin kompleks. - Masih minimnya penelitian, pengembangan, riset dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.	- Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan (deforestasi, abrasi, degradasi gambut) - Penurunan kualitas air dan sanitasi - Kerentanan wilayah terhadap bencana banjir dan rob - Ketimpangan akses dan kualitas layanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih) Urbanisasi dan tekanan Terhadap wilayah penyangga kota	- Demografi Global - Geopolitik dan Geaekonomi - Perkembangan Teknologi - Urbanisas i Dunia - Konstelasi Perdagangan Global - Pertumbuhan Kelas Menengah - Persaingan Sumber Daya Alam - Perubahan Iklim	- Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya - Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam - Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Strategi hilirisasi komoditas - Tata kelola DAS dan kawasan pesisir	- Kualitas data dan informasi Data yang digunakan sebagai dasar perencanaan sering kali belum terintegrasi secara optimal anantara perangkat daerah. Hal ini menyebabkan perencanaan menjadi kurang akurat dan berpotensi tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan. - Koordinasi dan sinkronisasi Proses perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi lintas sektor. Namun, masih terdapat hambatan komunikasi antar organisasi perangkat daerah yang menyebabkan keterlambatan, duplikasi program, atau kurangnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan pusat. - Pemanfaatan teknologi informasi Sistem informasi perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Masih ada pelayanan yang dilakukan secara manual sehingga menimbulkan keterlambatan dan menurunkan kualitas pelayanan publik - Kapasitas SDM Sebagai aparatur masih memerlukan peningkatan kompetensi, baik dalam hal perencanaan berbasis data, penyusunan dokumen perencanaan, maupun penguasaan aplikasi digital. Keterbatasan kapasitas SDM ini berdampak pada lambatnya respons terhadap kebutuhan sasaran layanan Bappeda - Transparansi dan aksesibilitas layanan Informasi terkait dokumen perencanaan, evaluasi, serta hasil pembangunan daerah belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat dan stakeholder lain, sehingga akuntabilitas pelayanan Bappeda masih perlu ditingkatkan. - Keterbatasan anggaran Keterbatasan alokasi anggaran sering menjadi kendala dalam pengembangan sistem pelayanan yang lebih modern dan responsif, termasuk dalam penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hal 00

3.1. Tujuan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

Tabel 3.3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN						K E T
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatkan Budaya Inovasi dan Kreativitas Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Indeks)	83,97	85	87	90	95	95	95	
			Nilai AKIP OPD (Indeks)	72,76	80,1	83	85	89	90	90	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai Perencanaan (Persen)	94,25	75	77	79	80	80	82	
		Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan (Persen)	94,25	89	91	93	95	97	97	
			Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (Persen)	90,88	94	95	96	97	98	98	
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	53,07	40,8	42,8	44,9	46,4	49	50	

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, Bappeda berperan strategis sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan. Melalui perumusan kebijakan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi program, Bappeda memastikan bahwa setiap langkah pembangunan senantiasa selaras dengan visi pembangunan daerah yang telah

ditetapkan.

Visi pembangunan daerah menjadi arah utama yang diwujudkan secara bertahap melalui misi pembangunan, yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Bappeda menjalankan fungsi perencanaan yang partisipatif, teknokratik, politis, dan top-down-bottom-up, sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Untuk mencapai misi, Bappeda memastikan setiap tujuan pembangunan dituangkan dalam indikator kinerja yang jelas, terukur, serta berbasis data. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis evidence-based planning, pemanfaatan data terpadu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sasaran strategis yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda tercermin dari meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, keterpaduan program lintas sektor, serta pencapaian indikator makro pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan IPM, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integrasi, Bappeda senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner, adaptif, dan responsif terhadap tantangan serta peluang, sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Tabel 3.3.2
Penahapan RENSTRA 2025 -2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2025	2026	2027	2028	2029
5	5	5	5	5
Perencanaan				
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Perekonomian dan SDA
Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengawasan dan - Evaluasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Inovasi				
Merumuskan arah kebijakan potensi inovasi daerah di seluruh sektor;	Lomba Inovasi pelayanan publik pada sektor prioritas (Pendidikan, Kesehatan dan Perizinan)	Implementasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan ke seluruh OPD dan wilayah kecamatan/desa;	Publikasi inovasi unggulan daerah melalui kerja sama dengan swasta dan BUMD	Membentuk tim penilai untuk menilai skor Indeks Inovasi Daerah secara signifikan;

Menetapkan Tim Inovasi Daerah dan penguatan Unit Kerja Inovasi di OPD; -	Pelatihan, inovasi dari masyarakat, ASN, dan pelaku usaha melalui kompetisi dan perlombaan serta penghargaan inovasi -	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem digital berbasis inovasi ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan; -	Penguatan fungsi koordinasi Pembentukan ekosistem inovasi daerah (triple helix: pemerintah, akademisi, dunia usaha); -	
Penerapan dan pemanfaatan Regulasi Inovasi Daerah dalam mendukung pembangunan daerah -	Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset; -	Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium inovasi daerah; -	Perjanjian kerja sama government to government antara pemerintah daerah dan kementerian hukum untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk inovasi lokal; -	
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung rumah inovasi daerah -	Membentuk tim penilai kinerja inovasi awal melalui sistem monitoring dan evaluasi sederhana. -	Pemberian insentif dan apresiasi daerah terhadap unit kerja atau desa paling inovatif. -	Publikasi melalui website kabupaten untuk Pengembangan platform digital untuk kolaborasi dan pemasaran inovasi daerah. -	
Sosialisasi budaya inovasi dan pelatihan dasar ASN, kepala desa, pelaku UMKM, dan masyarakat. Pelatihan dasar untuk ASN, kepala desa, pelaku UMKM dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan ide-ide baru yang relevan dengan potensi lokal. -				

3.2 Arah Kebijakan Bappeda dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis, Bappeda menetapkan arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah. Arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Bappeda selama periode Renstra, sehingga terbangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tabel 3.4
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET
1	2	3	4	5
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	- Implementasi SIPD secara optimal	
		- Peningkatan kualitas penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja	- Penguatan sistem koordinasi dengan OPD mitra (Desk, Konsultasi, Pendampingan, Rapat Koordinasi)	
			- Pendampingan penyusunan indikator kinerja dan perjanjian kinerja dengan prinsip "Specific (Spesifik), Masurable (Terukur), Achievable (Dapat dicapai), Relevant (Relevan), Time (Berbatas Waktu)" SMART.	
		- Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD secara sistematis dan terstruktur	- Pengumpulan data	
			- Penyusunan laporan evaluasi	
			- Tindaklanjut evaluasi	
			- Perbaikan berkelanjutan	
			- Pemanfaatan aplikasi E-Sakip	
		- Peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengawasan	- Peningkatan kapasitas SDM	
			- Penguatan fungsi pengawasan internal (SPIP/MRI OPD)	
			- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD	
			- Peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi	
		- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan	- Sinkronisasi perencanaan antar OPD	
			- Penguatan kolaborasi dengan pihak terkait	
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	- Penguatan kapasitas SDM	
		- Penguatan peran Bappeda dan Inspektorat dalam perencanaan dan pengawasan kinerja	- Penguatan Tim SAKIP Bappeda	
3	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi	- Peningkatan kapasitas SDM	
			- Pemanfaatan aplikasi E-Sakip	
			- Peningkatan kolaborasi antar OPD	
			- Standarisasi proses evaluasi kinerja	
		- Peningkatan	- Penguatan keamanan	

		infrastruktur dan jaringan teknologi informasi untuk mendukung layanan digital	data dan infrastruktur digital	
			- Penguatan kapasitas SDM bidang teknologi informatika	
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	- Penguatan sistem peringatan dini dan pengelolaan risiko bencana iklim	- Penyusunan baseline RAD GRK kaitannya dengan ekonomi hijau	
			- Kelembagaan RAD GRK	
		- Penguatan branding daerah	- Penyusunan profit mangrove kaitannya dengan ekonomi biru	
		- Peningkatan akses layanan air bersih dan sanitasi layak di 13 kecamatan	- Penyusunan FS sumber air baku untuk SPAM	

**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1. Uraian Program

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan Kepala Daerah sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sesuai Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat, Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi 2 : **“BERKAH Dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik”** dengan tujuan ***”Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah”***

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 – 2029. Adapun rincian lebih lanjut dapat di lihat pada tabel 4.1:

TABEL 4.1 PROGRAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKAT OR OUTCOM E	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAA N					16.820.000.0 00,00		18.164.000.0 00,00		17.835.000.0 00,00		17.870.000.0 00,00		17.870.000.0 00,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					12.878.000.0 00,00		13.269.000.0 00,00		13.610.000.0 00,00		13.945.000.0 00,00		13.945.000.0 00,00	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuha n Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	12.878.000.0 00,00	100	13.269.000.0 00,00	100	13.610.000.0 00,00	100	13.945.000.0 00,00	100	13.945.000.0 00,00	Bappeda
	Persentase Pemenuha n Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Bappeda
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH					1.800.000.00 0,00		2.525.000.00 0,00		1.845.000.00 0,00		1.545.000.00 0,00		1.545.000.00 0,00	

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	100	100	100	1.800.000.000,00	100	2.525.000.000,00	100	1.845.000.000,00	100	1.545.000.000,00	100	1.545.000.000,00	Bappeda
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.142.000.000,00		2.370.000.000,00		2.380.000.000,00		2.380.000.000,00		2.380.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	92	92	92	725.000.000,00	94	755.000.000,00	95	765.000.000,00	95	765.000.000,00	95	765.000.000,00	Bappeda
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92	92	92	840.000.000,00	94	885.000.000,00	95	885.000.000,00	95	885.000.000,00	95	885.000.000,00	Bappeda

	(Persentase)													
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	92	92	92	577.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00	Bappeda
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.695.000.000,00		3.715.000.000,00		3.745.000.000,00		3.765.000.000,00		3.770.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					3.410.000.000,00		3.420.000.000,00		3.435.000.000,00		3.450.000.000,00		3.450.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi (*)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	3.410.000.000,00	Inovatif	3.420.000.000,00	Inovatif	3.435.000.000,00	Sangat inovatif	3.450.000.000,00	Sangat inovatif	3.450.000.000,00	Bappeda
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					285.000.000,00		295.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00	
Meningkatnya jumlah dan kualitas inovasi daerah yang dihasilkan oleh pemerintah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	53,07	40,8	42,8	285.000.000,00	44,9	295.000.000,00	46,4	310.000.000,00	49	315.000.000,00	50	320.000.000,00	Bappeda

daerah, masyarakat, dan dunia usaha													
TOTAL KESELURUHA N					20515000000 .00		218790000000 .00		215800000000 .00		216350000000 .00		216400000000 .00

4.2. Uraian Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah, dan berkelanjutan, Bappeda melaksanakan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran Renstra. Kegiatan tersebut mencakup proses penyusunan dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, hingga RKPD yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Bappeda juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program lintas perangkat daerah, guna memastikan keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten.

Kegiatan lainnya meliputi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui monitoring capaian indikator kinerja, penyusunan laporan pembangunan, serta rekomendasi perbaikan kebijakan. Dalam mendukung inovasi pembangunan, Bappeda mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis digital, mendorong terbentuknya ekosistem inovasi daerah.

Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Bappeda sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Budaya Inovasi dan Kreativitas Daerah - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)		
					Nilai AKIP OPD (*)		
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

--	--	--	--

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	

--	--	--

Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

		Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan		Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai Perencanaan (%)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

				Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan (%)		
					Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan (%)		

			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

			Infrastruktur dan Kewilayahan				
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi (*)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

			dalam perencanaan pembangunan	Jumlah data inovasi daerah	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
				Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya jumlah dan kualitas inovasi daerah yang dihasilkan oleh		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

			pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	Meningkatnya Jumlah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang Dihasilkan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				16.320.000.000,00		17.639.000.000,00		17.285.000.000,00		17.295.000.000,00		17.295.000.000,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.378.000.000,00		12.744.000.000,00		13.060.000.000,00		13.370.000.000,00		13.370.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	12.378.000.000,00	100	12.744.000.000,00	100	13.060.000.000,00	100	13.370.000.000,00	100	13.370.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100				100		100					
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				118.000.000,00		129.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	118.000.000,00	1	129.000.000,00	1	140.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	15		15		15		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	15	50.000.000,00	15	55.000.000,00	15	60.000.000,00	15	65.000.000,00	15	65.000.000,00		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	50.000.000,00	6	55.000.000,00	6	60.000.000,00	6	65.000.000,00	6	65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00		
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.550.000.000,00		5.650.000.000,00		5.750.000.000,00		5.850.000.000,00		5.850.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	5.550.000.000,00	2	5.650.000.000,00	2	5.750.000.000,00	2	5.850.000.000,00	2	5.850.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31		31		31		31		31			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	31	5.000.000.000,00	31	5.000.000.000,00	31	5.000.000.000,00	31	5.000.000.000,00	31	5.000.000.000,00		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				500.000.000,00		520.000.000,00		540.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	20	20	500.000.000,00	20	520.000.000,00	20	540.000.000,00	20	560.000.000,00	20	560.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15		15		15		15					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	172	180		180		180		180					
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	172	180	150.000.000,00	180	150.000.000,00	180	150.000.000,00	180	150.000.000,00	180	150.000.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	20	20	200.000.000,00	20	220.000.000,00	20	240.000.000,00	20	260.000.000,00	20	260.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.390.000.000,00		2.510.000.000,00		2.630.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	2.390.000.000,00	12	2.510.000.000,00	12	2.630.000.000,00	12	2.750.000.000,00	12	2.750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	110.000.000,00	12	115.000.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	160.000.000,00	12	170.000.000,00	12	180.000.000,00	12	190.000.000,00	12	190.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	500.000.000,00	12	550.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.000.000,00	12	650.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	80.000.000,00	12	85.000.000,00	12	90.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perundang-undangan														
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00	12	90.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.450.000.000,00		1.500.000.000,00		1.550.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.450.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.550.000.000,00	12	1.600.000.000,00	12	1.600.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.515.000.000,00		1.515.000.000,00		1.515.000.000,00		1.515.000.000,00		1.515.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	325	25	1.515.000.000,00	25	1.515.000.000,00	25	1.515.000.000,00	25	1.515.000.000,00	25	1.515.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	42	10		10		10		10					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	392	20		20		20		20					
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4	1		1		1		1					
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				935.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00		935.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	42	10	935.000.000,00	10	935.000.000,00	10	935.000.000,00	10	935.000.000,00	10	935.000.000,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	392	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00	20	60.000.000,00		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	325	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00		
5.01.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	4	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.235.000.000,00		1.290.000.000,00		1.345.000.000,00		1.395.000.000,00		1.395.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.235.000.000,00	12	1.290.000.000,00	12	1.345.000.000,00	12	1.395.000.000,00	12	1.395.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				185.000.000,00		190.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	185.000.000,00	12	190.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00	12	195.000.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.050.000.000,00		1.100.000.000,00		1.150.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.050.000.000,00	12	1.100.000.000,00	12	1.150.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.070.000.000,00		1.130.000.000,00		1.140.000.000,00		1.150.000.000,00		1.150.000.000,00		
Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	150	1.070.000.000,00	150	1.130.000.000,00	150	1.140.000.000,00	150	1.150.000.000,00	150	1.150.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30		30		30		30		30			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30	30	500.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00	150	250.000.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				320.000.000,00		330.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00	1	340.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.800.000.000,00		2.525.000.000,00		1.845.000.000,00		1.545.000.000,00		1.545.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tepat Waktu (%)	100	100	1.800.000.000,00	100	2.525.000.000,00	100	1.845.000.000,00	100	1.545.000.000,00	100	1.545.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.020.000.000,00		1.865.000.000,00		1.015.000.000,00		865.000.000,00		865.000.000,00		
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	1.020.000.000,00	2	1.865.000.000,00	2	1.015.000.000,00	2	865.000.000,00	2	865.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	8	7		8		7		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1					
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				130.000.000,00		255.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00				
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2	130.000.000,00	2	255.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00				
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				135.000.000,00		255.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00				
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	135.000.000,00	1	255.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00				
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				155.000.000,00		255.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	155.000.000,00	2	255.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00				
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00		1.100.000.000,00		700.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00				
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	8	7	600.000.000,00	8	1.100.000.000,00	7	700.000.000,00	8	550.000.000,00	8	550.000.000,00				
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				135.000.000,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00				
Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	1	135.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00				
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				135.000.000,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00				
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang	0	1	135.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota	Diterbitkan (Buku)													
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				265.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	1	265.000.000,00	1	280.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				265.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	1	265.000.000,00	1	280.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	7	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00	1	380.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	7	1				1		1		1			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	7	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	7	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.142.000.000,00		2.370.000.000,00		2.380.000.000,00		2.380.000.000,00		2.380.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	92	92	840.000.000,00	94	885.000.000,00	95	885.000.000,00	95	885.000.000,00	95	885.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				840.000.000,00		885.000.000,00		885.000.000,00		885.000.000,00		885.000.000,00		
Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	2	2	840.000.000,00	2	885.000.000,00	2	885.000.000,00	2	885.000.000,00	2	885.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMDdan RKPD) (Dokumen)	4	4		4		4		4		4					
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				270.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00				
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	270.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00				
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00				
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00				
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00				
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				375.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		380.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	375.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00	2	380.000.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	6	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00	6	60.000.000,00		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	92	92	725.000.000,00	94	755.000.000,00	95	765.000.000,00	95	765.000.000,00	95	765.000.000,00		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				725.000.000,00		755.000.000,00		765.000.000,00		765.000.000,00		765.000.000,00		
Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	2	725.000.000,00	2	755.000.000,00	2	765.000.000,00	2	765.000.000,00	2	765.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				175.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	2	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)													
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	17	17	100.000.000,00	17	105.000.000,00	17	110.000.000,00	17	110.000.000,00	17	110.000.000,00		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				280.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	280.000.000,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00	1	285.000.000,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	9	9	100.000.000,00	9	105.000.000,00	9	110.000.000,00	9	110.000.000,00	9	110.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	92	92	577.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00	92	730.000.000,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				577.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	1	577.000.000,00	1	730.000.000,00	1	730.000.000,00	1	730.000.000,00	1	730.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	10	10		10		10		10		10			10

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2		2		2		2					
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				65.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	10	10	65.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00	10	85.000.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				290.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	290.000.000,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00	2	340.000.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				52.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	52.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0	2	35.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.695.000.000,00		3.715.000.000,00		3.745.000.000,00		3.765.000.000,00		3.770.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.410.000.000,00		3.420.000.000,00		3.435.000.000,00		3.450.000.000,00		3.450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil inovasi (*)	Inovatif	Inovatif	3.410.000.000,00	Inovatif	3.420.000.000,00	Inovatif	3.435.000.000,00	Sangat inovatif	3.450.000.000,00	Sangat inovatif	3.450.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Jumlah data inovasi daerah	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				2.775.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	1	2.775.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	2		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1		1		1		1					
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				150.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				225.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	225.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	0	2	2.000.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pekerjaan Umum (Dokumen)													
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				325.000.000,00		355.000.000,00		365.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	325.000.000,00	1	355.000.000,00	1	365.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				200.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	0	1	200.000.000,00	1	225.000.000,00	1	230.000.000,00	1	235.000.000,00	1	235.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	125.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	140.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				285.000.000,00		295.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		
Meningkatnya jumlah dan kualitas inovasi daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	53,07	42,8	285.000.000,00	44,9	295.000.000,00	46,4	310.000.000,00	49	315.000.000,00	50	320.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.00 00 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				285.000.000,00		295.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang Dihasilkan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	285.000.000,00	1	295.000.000,00	1	310.000.000,00	1	315.000.000,00	1	320.000.000,00		
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1		1		1		1					
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1				1					
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				155.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00	1	165.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00		
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				55.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00		60.000.000,00	1	65.000.000,00		

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, Bappeda melaksanakan berbagai sub kegiatan yang bersifat operasional dan teknis. Sub kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan, memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses ini dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, forum konsultasi publik, serta Musrenbang, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, partisipatif, dan sesuai kebutuhan pembangunan.

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai alat ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. IKU dirumuskan secara strategis agar mampu mencerminkan kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, IKU perangkat daerah diarahkan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar keluaran (output). Hal ini berarti capaian kinerja harus menunjukkan adanya perbaikan nyata terhadap kualitas perencanaan, efektivitas koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dampak positif bagi pembangunan daerah.

Target yang ditetapkan pada masing-masing IKU bersifat terukur, realistis, relevan, serta berbatas waktu (SMART) sehingga dapat dipantau perkembangannya secara periodik. Capaian IKU akan digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja tahunan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta penetapan rekomendasi kebijakan perbaikan pembangunan daerah.

Dengan demikian, keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan Renstra 2025–2029 dapat dilihat dari konsistensi pencapaian IKU yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja organisasi, tetapi juga menjadi jaminan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan nyata dalam mendorong pembangunan yang terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT									
2.	Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai Perencanaan	%	94,25	75	77	79	80	80	82	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	53,07	40,8	42,8	44,9	46,4	49	50	
4.	Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan	%	94,25	89	91	93	95	97	97	
5.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	*	83,97	85	87	90	95	95	95	
6.	Nilai AKIP OPD	*	72,76	80,1	83	85	89	90	90	
7.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	%	90,88	94	95	96	97	98	98	

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada periode 2025–2029 ditetapkan melalui ****Indikator Kunci (IKK)**** sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan wajib maupun pilihan daerah. IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan secara konsisten, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

IKK dirumuskan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah, serta kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam IKK bukan hanya menggambarkan capaian administratif, melainkan juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan mutu pelayanan publik, serta pencapaian pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Dalam periode 2025–2029, target kinerja melalui IKK diarahkan pada tercapainya ****efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi pelaksanaan program, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah****. Pencapaian IKK menjadi dasar dalam pengukuran kinerja pembangunan daerah, penilaian keberhasilan penyelenggaraan urusan, serta bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan perencanaan berikutnya.

Dengan adanya penetapan target IKK, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat berlangsung lebih ****terarah, transparan, dan akuntabel****, sehingga tujuan pembangunan daerah periode 2025–2029 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 - PERENCANAAN										
2.	Pemenuhan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, RENJA)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Pemenuhan Dokumen SAKIP Bappeda	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase keterwakilan stakeholder (kelompok rentan, LSM, OPD, Tokoh Masyarakat, â€¦) dalam musyawarah perencanaan Pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

6.	Persentase Penurunan temuan hasil Pemeriksaan BPK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase usulan prioritas masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	positif	%	80	80	82	84	86	88	90	
8.	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	positif	%	92	92	92	92	92	92	92	
9.	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	positif	%	92	92	92	92	92	92	92	
10.	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	positif	%	92	92	92	92	92	92	92	

11.	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Implementasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappeda	positif	Indeks	85	85	87	90	95	95	95	
15.	5.05 - PENELITIAN DAN										

	PENGEMBANGAN										
16.	Indeks Inovasi Daerah	positif	Indeks	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29	
17.	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
18.	Jumlah usulan inovasi daerah	positif	Usulan	20	20	22	24	26	28	30	
19.	Pemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan untuk perencanaan Pembangunan daerah (hasil penelitian pusat, provinsi dan daerah)	positif	%	30	30	35	40	45	50	55	

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 ini merupakan pedoman arah pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, serta menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di daerah.

Renstra ini disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, baik global, nasional, regional maupun lokal, serta mengakomodasi isu-isu strategis, kebutuhan pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Renstra Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 – 2029 sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan kerja sama seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan legislatif, partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyesuaian sesuai perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, diharapkan Renstra Bappeda Tahun 2025 – 2029 ini dapat menjadi pedoman sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.